

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada awal tahun 2023 terjadi sebuah fenomena dimana terdapat beberapa pejabat yang terlihat melakukan pamer kekayaannya di media sosial dan hal tersebut dilakukan oleh sejumlah pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, dari adanya kasus tersebut membuat KPK menyoroti isu tersebut. Sejumlah pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masuk dalam 'radar' Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Ni'am & Asril, 2023). Bermula dari salah satu pegawai Kementerian Keuangan yakni Rafael Alun Trisambodo yang menjadi sorotan publik karena memiliki harta kekayaan fantastis dimana berimbas dari kasus anaknya. Mulai dari kasus itulah yang membuat publik melakukan pencarian terhadap jajaran pegawai Kementerian Keuangan lainnya. Perhatian warganet menjalar dari satu pejabat ke pejabat lain di kementerian yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati (Ni'am & Asril, 2023).

Salah satu pegawai Kementerian Keuangan yang menjadi sorotan adalah Andhi Pramono, ia merupakan seorang Kepala Bea dan Cukai Makassar, Sulawesi Selatan. Kasus Andhi Pramono bermula sejak bulan Maret 2023 dimana saat itu publik menyoroti Andhi Pramono. Pada saat itu terdapat salah satu akun twitter bernama Partai Socmed dimana mengunggah Video yang menunjukkan rumah mewah yang diperkirakan dimiliki Andhi Pramono. Dalam video tersebut pun dilengkapi dengan sebuah narasi seperti, "Gaya hidup mewah oknum PNS Kemenkeu mulai menyita perhatian publik. Salah satunya Andhi Pramono S.E M.M selaku Kepala Bea Cukai Makassar, yang diduga memiliki hunian mewah di kawasan Legenda Wisata Cibubur," demikian narasi yang tertulis dalam video tersebut (Ramadhaningtyas, 2023). Dari postingan rumah tersebut yang menjadi viral menyebabkan Andhi Pramono dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan oleh Kemenkeu serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dimana menghasilkan Andhi Pramono dilakukan pencopotan dari Jabatannya sebagai Kepala Bea Cukai Makassar (Aji, 2023).

Setelah dirinya dilakukan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK pun mengumumkan bahwa telah menetapkan Andhi sebagai tersangka gratifikasi per tanggal 15 Mei 2023 penetapan ini dilakukan oleh KPK karena dinilai telah memegang cukup bukti untuk membawa perkara tersebut menuju tahap penyidikan (Aji, 2023). Kemudian dalam jangka waktu sebulan setelah penetapan tersangka Andhi Pramono ditetapkan kembali kali ini menjadi tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), penetapan yang dilakukan oleh KPK kali ini berlandaskan bahwa ditemukannya indikasi bahwa Andhi Pramono sengaja melakukan upaya menyembunyikan serta menyamarkan asal-usul aset yang dinilai berasal dari tindakan pidana korupsi yang ia lakukan. Berdasarkan penyidikan yang telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga bahwa Andhi Pramono menerima gratifikasi serta TPPU terkait dengan pengurusan barang ekspor impor pada kantor pelayanan Bea Cukai Makassar (Aji, 2023).

Andhi Pramono dapat dikatakan sebagai pegawai yang memiliki harta kekayaan yang sangat fantastis dibandingkan dengan atasannya dalam jajaran instansi Bea dan Cukai di Indonesia dimana dengan posisi Andhi Pramono sebagai bawahan ia dapat masuk dalam posisi ketiga dari 20 Kepala Kantor Wilayah yang ada. Mulai Kepala Kanwil DJBC Sumatra Bagian Barat Azhar Rasyidi: Rp17,5 miliar di urutan pertama, kemudian Kepala Kanwil DJBC Banten Rahmat Subagio: Rp13,9 miliar (Ahdiat, 2023). Andhi Pramono memiliki total harta kekayaan sebesar 13,7 miliar per 2021 dan nilai tersebut masih jauh dibandingkan dengan atasan Andhi Pramono sendiri yakni Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Bagian Selatan Nugroho Wahyu Widodo yang hanya memiliki harta kekayaan sebesar 1,25 miliar.

Sebenarnya seorang pejabat yang menyandang status ASN memiliki kode etik yang perlu mereka pegang teguh namun dalam hal ini yang dilakukan oleh Andhi Pramono termasuk melanggar kode etik tersebut adapun kode etik tersebut tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 5 ayat 2 UU ASN yang dimana terdapat banyak kode etik dan kode perilaku tersebut berisi pengaturan terkait perilaku yang harus diambil oleh para apratur sipil negara salah satu diantaranya sebagai berikut yaitu : melaksanakan tanggung jawab dengan

integritas, akuntabilitas, dan kejujuran yang tinggi. Selain itu, menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan persyaratan hukum dan memastikan bahwa tidak terjadi konflik kepentingan selama menjalankan tanggung jawab tersebut (Rio, 2022).

Berdasarkan dari kasus yang dilakukan oleh Andhi Pramono kasus tersebut termasuk dalam kategori konflik berkepentingan yang dimana salah satu sumber dari konflik berkepentingan adalah tindakan gratifikasi. Gratifikasi sendiri merupakan suatu pemberian yang mempunyai arti atau derajat yang luas yang meliputi pemberian uang tunai, produk, komisi, kredit gratis premium, tiket perjalanan, penginapan, perjalanan, kunjungan, pengobatan klinis gratis serta fasilitas lainnya. (Rio, 2022).

Dengan adanya pemberian imbalan dari pihak lain tentunya akan mempengaruhi integritas seseorang dalam melakukan pekerjaannya, adapun bentuk konflik kepentingan yang mungkin timbul dari pemberian hibah atau gratifikasi antara lain: penerima hibah dapat mempunyai kepentingan pribadi (personal interest) dan kewajiban timbal baik atas hibah yang dapat menghambat independensi ASN dan menghambat penerimaan hibah. Apabila objektivitas serta penilaian profesional ASN terganggu, maka penerimaan tunjangan dapat digunakan guna menutupi terjadinya tindak pidana korupsi (Rio, 2022).

Pada tahun 2022 tercatat bahwa tindakan gratifikasi terbilang cukup banyak dimana berdasarkan databoks Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima sebanyak 4.365 laporan terkait gratifikasi selama periode 1 Januari sampai 22 Desember 2022, adapun jenis gratifikasi yang paling banyak dilaporkan yaitu berupa karangan bunga, makanan maupun minuman dengan jumlah laporan mencapai 658, sedangkan kedua terbesar adalah gratifikasi berupa uang, voucher, logam mulia maupun alat tukar lainnya yang mencapai 409 laporan (Annur, 2022). Selain itu menurut KPK instansi yang paling banyak melakukan pelaporan gratifikasi merupakan Kementerian Keuangan yaitu sebanyak 836 laporan (Annur, 2022).

Melihat data tersebut menyatakan bahwasannya banyak sekali gratifikasi terjadi, gratifikasi sendiri juga terjadi dalam kehidupan bermasyarakat seperti halnya seorang memberikan suatu hadiah atau jasa kepada temannya dan teman tersebut pastinya akan merasakan memiliki rasa untuk membalas budi atas

perbuatan yang telah mereka berikan untuknya. Namun yang menjadi permasalahan dalam gratifikasi adalah ia merupakan salah satu sumber dari terjadinya korupsi terpentingnya dalam bidang pemerintahan.

Jika gratifikasi terjadi dalam bidang pemerintahan atau dalam suatu instansi orang yang menerima gratifikasi tersebut tentunya bisa bertindak sesuai dengan jumlah atau besarnya pemberian hadiah yang telah ia dapatkan dan hal itu dapat mempengaruhi independensi mereka dalam melakukan pekerjaan yang dimana seharusnya mengikuti sebuah peraturan yang sudah diberlakukan oleh suatu instansi namun mereka tidak menghiraukan peraturan tersebut.

Kasus pamer kekayaan yang dilakukan oleh Andhi Pramono ini telah mendapat sorotan dari berbagai media nasional, yang dimana setiap media menyajikan berita dari sudut pandang yang berbeda. Seperti salah satu contohnya media Tribunnews.com yang ikut menyoroti isu pamer kekayaan yang dilakukan oleh Andhi Pramono. Tribunnews.com merupakan salah satu portal berita terbesar di Indonesia serta memiliki jangkauan informasi yang sangat luas atau bersifat nasional. Adapun salah satu bentuk pemberitaan yang dilakukan oleh Tribunnews.com terkait isu pamer kekayaan Andhi Pramono ini.



Gambar 1.1 Berita Tribunnews.com
Sumber: Tribunnews.com

Pada pemberitaan yang dikeluarkan oleh Tribunnews.com ini menyoroti gaya berpakain Andhi Pramono yang mewah dengan jam tangan berharga yang mahal, di berita ini Tribunnews memberikan kritik bahwasannya dengan jabatan sebagai pejabat eselon gaji pokok paling rendah nya sebanyak 3 juta sampai tertinggi 5,9 juta perbulannya namun Andhi memiliki nilai kekayaan sebesar 13,7

miliar, selain itu disoroti juga terkait rumah megahnya di cibubur. Dalam pemberitaan ini hanya menghadirkan dari satu sisi saja yaitu pihak dari KPK. Kemudian disebutkan juga bahwa Andhi Pramono pernah mendapatkan penghargaan saat menjabat sebagai Kepala Bea Cukai Makassar.

Selain Tribunnews.com yang mencoba menyoroti kasus ini, disisi lain terdapat media lokal juga yang ikut menyoroti isu atau kasus pamer kekayaan ini salah satunya yaitu Herald.id, Herlad.id merupakan sebuah media pemberitaan yang sangat baru dan awalnya terbentuk di Makassar, dengan berteptanya media tersebut di Makassar dimana dekat dengan kasus yang terjadi oleh karena itu yang menjadi fokus disini adalah apakah adakah perbedaan dari media yang sangat baru serta asal yang dekat dengan kasus ini dapat mempengaruhi media tersebut dalam melakukan pemberitaan terkait kasus tersebut. Selain itu fokus media ini akan tertuju pada pemberitaan yang dilakukan di kanal atau domain awal mereka yaitu kanal Sulawesi Selatan terkait dengan pemberitaan kasus dugaan korupsi Kepala Bea Cukai Makassar. Adapun salah satu bentuk pemberitaan dari Herald.id dalam kanal Sulsel.

Gaya Kepala Bea Cukai Makassar Disorot,
Harga Arlojinya 60 Kali Lipat dari Gaji PNS

10 Maret 2023, 20:25 - Visual



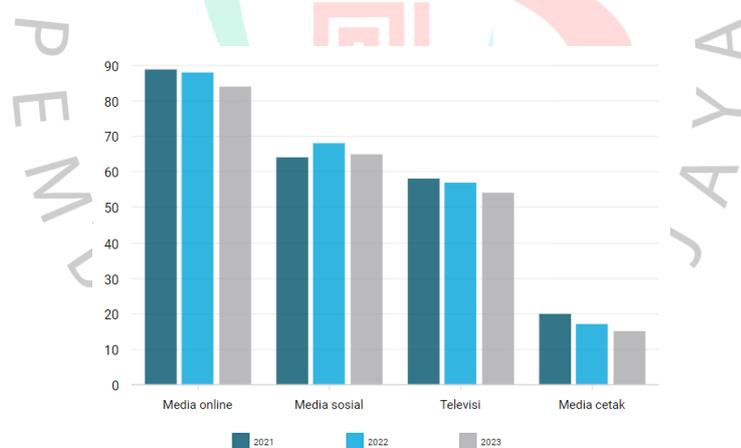
Gambar 1.2 Berita Herald.id Kanal Sulsel
Sumber: Herald Sulsel.id

Pemberitaan yang dilakukan oleh Herald.id dalam kanal Sulsel sama seperti halnya Tribunnews.com yang mencoba menyoroti gaya dari Andhi Pramono, tidak seperti Tribunnews.com Herald.id tidak mencoba mengkritik pendapatan seorang pejabat eselon yang tidak sesuai nilai harta kekayaannya yang fantastis, namun Herald.id hanya memasukan pernyataan dari cuitan masyarakat di media sosial yang mencoba menyoroti jam tangan mahal milik Andhi Pramono. Dalam pemberitaan ini menghadirkan dua sisi baik itu pernyataan masyarakat di media sosial serta dari pihak Bea Cukai Makassar. Dilain sisi terdapat hal yang

menarik dalam pemberitaan ini dimana meskipun Andhi disorot menggunakan barang mahal tetapi pihak Bea Cukai Makassar menganggap bahwa Andhi Pramono merupakan orang yang sederhana.

Berdasarkan dari penulisan berita yang ada terlihat bagaimana kedua media memiliki pandangan yang berbeda ketika menulis berita dengan topik yang sama ini, oleh karena itu menjadi hal yang menarik untuk diteliti bagaimana pembedaan yang dilakukan oleh media nasional dengan media baru namun dalam konteks pemberitaan lokalnya.

Saat ini pemberitaan tidak hanya bisa kita dapatkan melalui siaran televisi maupun media online, tetapi saat ini pemberitaan bisa kita dapatkan juga melalui media sosial dimana seperti yang kita tahu bahwa pengguna media sosial merupakan pengguna yang sangat banyak saat ini dimana berdasarkan Menurut laporan We Are Social dari DataIndonesia.id, pada Januari 2023, ada 167 juta orang di Indonesia yang aktif menggunakan media sosial yang dimana jumlah tersebut mencakup sebesar 60,4% dari populasi dalam negeri (Widi, 2023)



Gambar 1.3 Data media *online* masih menjadi sumber utama informasi masyarakat
Sumber: Databoks

Jika kita melihat bahwa media sosial merupakan salah satu *platform* dengan pengguna yang sangat banyak dan masyarakat bisa mengakses informasi berita secara cepat dan mudah di media sosial . Namun jika kita melihat data dari Databoks ini ternyata media *online* tetap menjadi sumber utama masyarakat dalam mencari atau memperoleh informasi berita, data ini berdasarkan temuan dari survei Reuters Institute terbaru bertajuk *Digital News Report 2023* (Annur, 2023).

Media online kini menyajikan banyak topik pemberitaan yang dapat dibaca oleh semua lapisan masyarakat dan tentunya banyak media menginginkan media mereka dapat dikunjungi oleh banyak orang oleh karena itu jika terdapat suatu kasus atau isu yang hangat terjadi diluar sana tentunya media-media akan berusaha melakukan pemberitaan terkait hal tersebut seperti halnya dengan kasus korupsi menjadi salah satu topik yang hangat dalam sebuah media.

Media online sendiri sebagai media pemberitaan tidak hanya menyajikan suatu berita saja namun mereka memiliki fungsinya tersendiri seperti halnya fungsi untuk pendidikan serta informasi dimana media akan memberikan wawasan baru bagi para pembaca, kemudian fungsi hiburan dimana tidak hanya media memberikan berita-berita yang terkesan berat namun dilain sisi dapat diisi dengan berita yang bersifat menghibur seperti adanya *soft news*, lalu fungsi pengawasan dimana media dapat menjadi pengawas terhadap suatu peristiwa ataupun kejadian yang terjadi di suatu lingkungan yang dimana dapat menjadi informasi untuk masyarakat setempat untuk melakukan tindakan preventif agar tidak terkena dampaknya.

Dilain sisi media memiliki fungsi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat luas terkadang media dapat membuat sebuah pembingkaiakan akan suatu kasus atau isu agar dapat mempengaruhi para pembacanya yang dimana disebut dengan *framing*. Menurut (Darmawan & Nailufar, 2022) *Framing* media berarti pembingkaiakan media untuk memberitakan suatu topik atau isu yang tersebar luas di masyarakat. *Framing* juga berarti sudut pandang yang dipilih media untuk menyampaikan suatu isu.

Tindakan *framing* dapat terlihat contoh seperti halnya jika terjadi suatu kasus terkait suatu kebijakan maka terkadang terdapat perbedaan pembingkaiakan berita dimana salah satu media akan menempatkan posisinya sebagai pro dan sebaliknya media lain akan bersifat kontra yang dimana pada nantinya hal tersebut dapat mempengaruhi khalayak luas nantinya.

Oleh sebab itu dalam penelitian akan mencoba melakukan penelitian dengan menggunakan metode analisis *framing* milik Zhong Dang Pan & M Gerald Kosicki yaitu dimana peneliti ingin mengetahui bagaimana sebuah media melakukan pemberitaan terkait dengan pameran kekayaan yang berujung pada

dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh seorang kepala Bea Cukai Makassar dalam dua media online yang berbeda yaitu Tribunnews.com dan Herald.id.

Alasan peneliti menggunakan kedua media tersebut yaitu sebab Tribunnews merupakan salah satu media nasional yang besar dan memiliki jumlah pengunjung yang banyak serta mereka memiliki cakupan atau jaringan yang tersebar luas di seluruh Indonesia dan memiliki lebih dari 1.500 wartawan sehingga mereka dapat melakukan pemberitaan di berbagai daerah dan tidak lupa mereka juga termasuk dalam group besar yaitu Kompas Gramedia.

Kemudian terdapat alasan mengapa memilih media Herald.id, Herald.Id merupakan media *online* baru terbentuk di Makassar. Media ini merupakan salah satu media yang berasal dari Makassar dan media ini memiliki sifat yang sama dengan Tribunnews.com yakni memiliki kanal daerah yang dimana ikut menyoroti kasus yang terjadi terkait Kepala Bea Cukai Makassar diantara media lainnya yang berada di kota Makassar dan Herald.id memiliki jumlah pemberitaan yang sedikit lebih dari media asal Makassar lainnya bahkan banyak media lokal yang berbasis di Makassar tidak melakukan pemberitaan sama sekali terkait kasus yang terjadi ini.

Pada penelitian ini memiliki kumpulan penelitian terdahulu yang dimana menjadi sebuah acuan bagi peneliti dalam menyusun penelitian ini adapun penelitian terdahulu memiliki sedikit kesamaan baik dari segi topik penelitian yaitu terkait dengan kasus korupsi dan kemudian dalam penggunaan metode analisis yang dilakukan yaitu dengan menggunakan metode analisis *framing*. Adapun penelitian terdahulu pertama yang diteliti oleh Henny Sri Kusumawati, Nuryani Tri Rahayu, dan Retno Handayani pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Framing Berita Korupsi e-KTP Setya Novanto Pada Media Online”.

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dengan media yang menjadi bahan analisis yaitu media Tribunnews.com. Penelitian tersebut berkesimpulan bahwa dari analisis yang dilakukan terkait berita korupsi e-KTP Setya Novanto di Tribunnews.com, proses *framing* berita Tribunnews.com melibatkan pemilihan sumber berita, pemilihan pernyataan dari sumber-sumber tersebut, dan penggunaan gambar untuk menyoroti Setya Novanto sebagai tersangka korupsi e-ktip, komponen-komponen

ini berfungsi untuk memperkuat skema *framing* yang diterakan oleh Tribunnews.com.

Kemudian penelitian terdahulu kedua yang diteliti oleh Maura Frilicia Van Yusat, dan Hendra Setiawan pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Framing Berita Pegawai Pajak Korupsi Pada Surat Kabar Kompas.com dan Detikfinance”. Pada penelitian ini memiliki kesamaan dalam penggunaan metode analisis yaitu menggunakan analisis *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.

Menurut temuan penelitian tersebut, pemberitaan tentang korupsi memiliki fokus yang berbeda. Dimana Detikfinance mencantumkan gaji pejabat pajak di Indonesia dan menimbulkan kekhawatiran publik tentang alasan mengapa otoritas menyalahgunakan posisi dan tugas mereka untuk melakukan korupsi, sementara Kompas.com menyoroti kronologi penyelidikan KPK dan penetapan tersangka terhadap pejabat pajak.

Dengan kedua penelitian terdahulu yang sudah disebutkan, maka terdapat pembaruan dari penelitian sebelumnya yaitu terkait dengan topik penelitian dimana objek penelitian pada penelitian terdahulu adalah tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum atau anggota Dirjen Pajak yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan.

Sedangkan objek penelitian ini adalah dugaan korupsi anggota atau pejabat Bea Cukai Makassar di bawah Kementrian Keuangan dikarenakan pamer harta kekayaan. Selain hal tersebut terdapat pembaruan dari jenis media dimana berdasarkan penelitian dahulu memilih media *mainstream* atau nasional sebagai bahan analisis sedangkan dalam penelitian ini ingin melihat bagaimana pembingkaiian yang dilakukan dua media baik itu dari media *online* nasional dengan media *online* baru yang berasal dari kota tempat kejadian kasus dan berfokus pada kanal mereka paling awal yaitu kanal Sulawesi Selatan. oleh karena itu peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian terkait pembingkaiian pemberitaan dugaan korupsi kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono dalam media Tribunnews dan Herald.id periode Maret 2023 – Juli 2023.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimanakah pembingkaiian pamer kekayaan pejabat daerah sebagai indikator dugaan korupsi dalam media Tribun News dan Herald.id periode Maret 2023 – Juli 2023?.

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pembingkaiian pamer kekayaan pejabat daerah sebagai indikator dugaan korupsi dalam media Tribun News dan Herald.id periode Maret 2023 – Juli 2023

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, adapun terdapat dua jenis manfaat diantaranya:

1.4.1. Manfaat Akademis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan referensi dalam bidang jurnalistik terkait metode framing dalam membingkai suatu isu korupsi

1.4.2 Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran terkait bagaimana media membingkai kasus korupsi terkait dengan pamer kekayaan sebagai indikator dugaan korupsi. Kemudian diharapkan bisa menjadi pembelajaran bagi para pembaca terkait bagaimana media melakukan framing terkait dengan pamer kekayaan sebagai indikator kasus dugaan korupsi.